



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004 SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perubahan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2004;

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
Dan  
WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 mengalami perubahan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan
  - a. Semula Rp. 615.791.897.000,-
  - b. Bertambah Rp. 15.517.599.000,-
  - Jumlah Rp. 631.309.496.000,-
2. Anggaran Belanja
  - a. Semula Rp. 671.653.985.000,-
  - b. Bertambah Rp. 134.851.833.000,-
  - Jumlah Rp. 806.505.818.000,-
  - Defisit setelah perubahan Rp. 175.196.322.000,-
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    1. Semula Rp. 76.043.237.000,-
    2. Bertambah Rp. 118.119.127.000,-
    - Jumlah Rp. 194.153.364.000,-
  - b. Pengeluaran
    1. Semula Rp. 20.172.149.000,-
    2. Berkurang Rp. 1.215.107.000,-
    - Jumlah Rp. 18.957.042.000,-
    - Surplus pembiayaan setelah perubahan Rp. 175.196.322.000,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah;
6. Lampiran VI Neraca Daerah.

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Juli 2004

**WALIKOTA SEMARANG**

**ttd**

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**SAMAN KADARISMAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2004 SERI A**

Lampiran  
Perda

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR : 16 TAHUN 2004  
TANGGAL : 19 JULI 2004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

NO.	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2004	PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2004	BERTAMBAH (BERKURANG) ( 4 - 3 )	%
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1.	Bag. Pendapatan Asli Daerah	148.707.545.000	147.298.469.000	(1.409.076.000)	(0,95)
a.	Pos Pajak Daerah	81.830.000.000	86.530.000.000	4.700.000.000	5,74
b.	Pos Retribusi Daerah	53.739.295.000	46.734.163.000	(7.005.132.000)	(13,04)
c.	Pos Bagian Laba BUMD	382.117.000	357.746.000	(24.371.000)	(6,38)
d.	Pos Lain-2 PAD yg. sah	12.756.133.000	13.676.560.000	920.427.000	7,22
2.	Bag. Dana Perimbangan	443.082.365.000	457.520.926.000	14.438.561.000	3,26
a.	Pos Bagi Hasil Pajak	128.000.000.000	138.500.000.000	10.500.000.000	8,20
b.	Pos Bagi Hasil Bukan Pajak	8.365.000	821.511.000	813.146.000	9720,81
c.	Pos Dana Alokasi Umum	310.074.000.000	313.199.415.000	3.125.415.000	1,01
d.	Pos Dana Alokasi Khusus	5.000.000.000	5.000.000.000	0	-
3.	Bag. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.001.987.000	26.490.101.000	2.488.114.000	10,37
a.	Pos Lain-2 Pendapatan Daerah yang sah	24.001.987.000	26.490.101.000	2.488.114.000	10,37
	Jumlah Pendapatan	615.791.897.000	631.309.496.000	15.517.599.000	2,52
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>				
1.	Belanja Aparatur Daerah	152.242.956.000	186.368.603.000	34.125.647.000	22,42
A.	Belanja Adm. Umum	87.426.493.000	100.648.810.000	13.222.317.000	15,12
a.	Belanja Pegawai	64.175.559.000	75.750.805.000	11.575.246.000	18,04
b.	Belanja Barang & Jasa	15.389.221.000	15.419.716.000	30.495.000	0,20
c.	Belanja Pemeliharaan	4.641.047.000	5.893.195.000	1.252.148.000	26,98
d.	Belanja Perjalanan Dinas	3.220.666.000	3.585.094.000	364.428.000	11,32
B.	Belanja Operasi & Peme	11.685.362.000	13.607.153.000	1.921.791.000	16,45
C.	Belanja Modal	5.143.101.000	7.467.315.000	2.324.214.000	45,19
D.	Belanja Transfer	47.988.000.000	64.645.325.000	16.657.325.000	34,71
2.	Belanja Pelayanan Publik	502.487.761.000	603.275.806.000	100.788.045.000	20,06
A.	Belanja Adm. Umum	338.331.927.000	345.399.293.000	7.067.366.000	2,09
a.	Belanja Pegawai	324.192.832.000	331.028.346.000	6.835.514.000	2,11
b.	Belanja Barang & Jasa	11.364.566.000	11.316.918.000	(47.648.000)	(0,42)
c.	Belanja Pemeliharaan	2.324.589.000	2.550.787.000	226.198.000	9,73
d.	Belanja Perjalanan Dinas	449.940.000	503.242.000	53.302.000	11,85
B.	Belanja Operasi & Peme	50.457.047.000	111.391.440.000	60.934.393.000	120,76
C.	Belanja Modal	82.981.635.000	90.853.222.000	7.871.587.000	9,49
D.	Belanja Transfer	30.717.152.000	55.631.851.000	24.914.699.000	81,11
3.	Belanja tidak tersangka	2.924.050.000	6.862.191.000	3.938.141.000	134,68

1	2	3	4	5	6
4.	Belanja Bunga Hutang	13.999.218.000	9.999.218.000	(4.000.000.000)	(28,57)
	Jumlah Belanja	671.653.985.000	606.505.816.000	134.851.833.000	20,08
	(DEFISIT)	(55.862.088.000)	(175.196.322.000)	(119.334.234.000)	213,62
C	PEMBIAYAAN				
	1. Penerimaan Pembiayaan	76.034.237.000	194.153.364.000	118.119.127.000	155,35
	a. Sisa Lebih Tahun Lalu	7.500.000.000	65.689.424.000	58.189.424.000	775,86
	b. Utang pada Pihak ke-3	64.224.000.000	114.474.000.000	50.250.000.000	78,24
	c. Transfer dari Dana Cadangan	4.310.237.000	13.989.940.000	9.679.703.000	224,57
	2. Pengeluaran Pembiayaan	20.172.149.000	18.957.042.000	(1.215.107.000)	(6,02)
	a. Angsuran Hutang	20.172.149.000	14.252.042.000	(5.920.107.000)	(29,35)
	b. Bantuan Modal	0	4.705.000.000	4.705.000.000	
	c. Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0	
	3. Surplus Pembiayaan ( C1 - C2 )	55.862.088.000	175.196.322.000	119.334.234.000	213,62

**WALIKOTA SEMARANG**

**tdl**

**H. SUKAWI SUTARIP**

PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG  
 DAFTAR REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2004

KODE SBL	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	BELANJA OPERASI dan PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA	SURPLUS (DEFISIT) (2-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>PEMERINTAHAN UMUM &amp; SOSIAL</b>	<b>578.081.377.000</b>	<b>152.031.737.000</b>	<b>14.499.304.000</b>	<b>1.733.815.000</b>	<b>78.094.908.000</b>	<b>251.299.482.000</b>	<b>326.781.915.000</b>
2.1.01	DPRD	-	8.173.606.000	-	-	-	8.173.606.000	(8.173.606.000)
2.1.02	Sekretariat DPRD	-	5.884.500.000	401.000.000	898.000.000	611.525.000	7.443.025.000	(7.443.025.000)
2.1.03	Wakil Kota	-	1.378.871.000	75.000.000	32.400.000	-	1.476.401.000	(1.476.401.000)
2.1.04	Wakil Walikota	-	811.248.000	35.000.000	25.800.000	-	942.100.000	(942.100.000)
2.1.05	Sekretariat Daerah	600.707.000	42.744.374.000	1.940.850.000	5.794.896.000	47.564.200.000	58.008.090.000	97.068.305.000
2.1.06	Bappeda	-	3.173.333.000	1.094.884.000	25.150.000	-	5.068.307.000	(5.068.307.000)
2.1.07	Badan Pengantar Daerah	-	2.221.094.000	268.370.000	19.875.000	-	2.489.349.000	(2.489.349.000)
2.1.08	Badan Kestbang Lintas	-	1.448.725.000	360.271.000	380.300.000	11.388.501.000	13.458.077.000	(13.458.077.000)
2.1.10	Badan Kependidikan Daerah	-	1.888.002.000	3.204.188.000	30.915.000	-	5.208.095.000	(5.208.095.000)
2.1.11	Kantor Administrasi dan Komunikasi	-	1.823.987.000	428.797.000	20.500.000	-	2.281.704.000	(2.281.704.000)
2.1.12	Kantor PDE	-	5.415.092.000	300.877.000	258.500.000	-	5.983.499.000	(5.983.499.000)
2.1.13	Kantor Sespai PP	-	2.185.730.000	281.672.000	300.000.000	-	2.777.402.000	(2.777.402.000)
2.1.15	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	577.030.070.000	30.681.370.000	4.786.628.000	458.429.000	18.458.000.000	52.981.425.000	304.548.245.000
2.1.18	Rekamatan	-	80.942.302.000	531.700.000	-	-	51.473.882.000	(51.473.882.000)
	<b>PERTANIAN, KEHUTANAN &amp; PERKESUNAN</b>	<b>28.700.000</b>	<b>2.758.038.000</b>	<b>1.528.200.000</b>	<b>12.540.888</b>	<b>-</b>	<b>4.298.838.000</b>	<b>(4.269.138.000)</b>
2.3.03	Dinas Pertanian	28.700.000	2.758.038.000	1.528.200.000	12.540.888	-	4.298.838.000	(4.269.138.000)
	<b>PERIKANAN &amp; KELAUTAN</b>	<b>11.715.000</b>	<b>1.418.708.000</b>	<b>708.971.000</b>	<b>2.760.500.888</b>	<b>-</b>	<b>4.888.171.000</b>	<b>(4.868.456.000)</b>
2.4.03	Dinas Kelautan & Perikanan	11.715.000	1.418.708.000	708.971.000	2.760.500.888	-	4.888.171.000	(4.868.456.000)
	<b>PERINDUSTRIAN &amp; PERDAG</b>	<b>8.141.840.000</b>	<b>10.031.838.000</b>	<b>2.784.654.000</b>	<b>179.860.888</b>	<b>43.270.000</b>	<b>13.588.613.000</b>	<b>(5.438.673.000)</b>
2.4.02	Dinas Perindustrian & Perdagangan	195.000.000	2.108.062.000	387.100.000	180.000.000	42.270.000	2.697.422.000	(2.697.422.000)
2.4.05	Dinas Pasar	8.035.840.000	8.495.787.000	2.367.554.000	19.860.888	-	10.883.191.000	(2.848.551.000)
	<b>PERKOPERASIAN</b>	<b>-</b>	<b>1.679.387.000</b>	<b>53.822.900</b>	<b>37.025.888</b>	<b>1.188.000.000</b>	<b>2.879.234.000</b>	<b>(2.879.234.000)</b>
2.4.06	Dinas Koperasi & UKM	-	1.679.387.000	53.822.900	37.025.888	1.188.000.000	2.879.234.000	(2.879.234.000)
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>-</b>	<b>1.052.243.000</b>	<b>102.840.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.241.883.000</b>	<b>(1.241.883.000)</b>
2.4.04	BKPM PB dan Asist Daerah	-	1.052.243.000	102.840.000	7.000.000	-	1.241.883.000	(1.241.883.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	-	2.981.842.000	690.216.000	74.979.000	-	3.747.036.000	(3.747.036.000)
2.3.11	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	-	2.981.842.000	690.216.000	74.979.000	-	3.747.036.000	(3.747.036.000)
	<b>KESIHATAN</b>	11.400.051.000	23.299.374.444	42.902.378.000	6.726.903.000	-	40.986.061.000	(29.585.410.000)
2.3.01	Dinas Kesehatan	13.000.000	17.893.627.000	996.112.000	3.710.000.000	-	22.603.639.000	(22.464.643.000)
2.3.02	RSUD	7.214.267.000	4.218.169.000	7.256.406.000	700.000.000	-	12.172.656.000	(4.899.398.000)
2.3.03	Puskesmas	4.053.126.000	1.148.778.000	4.731.786.000	316.900.000	-	6.193.467.000	(2.142.333.000)
	<b>PENDIDIKAN &amp; OLARAHAGA</b>	770.100.000	216.843.454.200	5.871.949.800	338.562.000	43.948.000.000	269.237.586.000	(258.467.429.000)
2.1.13	Kantor Kepala Uraan & Aera	-	562.671.200	12.745.000	123.000.000	-	700.417.000	(700.417.000)
2.1.04	Dinas Pendidikan	770.100.000	128.212.076.000	1.527.573.000	17.500.000	43.999.000.000	172.792.108.000	(171.991.948.000)
2.1.00	-SLTP	-	40.623.733.000	1.409.048.000	114.966.000	-	42.238.586.000	(42.238.586.000)
2.1.06	SMP	-	22.561.003.000	961.798.000	29.914.000	-	23.551.823.000	(23.551.823.000)
2.1.07	SMK	-	16.077.729.000	1.071.068.000	33.000.000	-	17.182.478.000	(19.182.478.000)
2.1.08	SD, TK	-	858.195.000	6.000.000	-	-	812.155.000	(812.155.000)
	<b>PENATAAN RUANG &amp; PERUMAHAN</b>	11.778.579.000	12.847.281.800	13.229.276.000	1.829.538.000	-	28.676.185.000	(16.805.625.000)
2.2.01	Dinas Kelangkaan	24.626.000	3.181.762.000	710.811.000	1.370.580.000	-	4.173.073.000	(4.147.548.000)
2.2.03	Dinas Perumahan & Pemukiman	2.261.698.000	5.978.016.000	11.022.615.000	360.718.000	-	19.270.405.000	(15.291.718.000)
2.2.05	Dinas Tata Kota & Perumahan	9.294.255.000	4.487.503.000	1.205.850.000	360.280.000	-	5.133.713.000	(3.660.842.000)
	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	1.642.800.000	4.715.962.000	62.456.050.000	78.864.064.000	-	135.836.016.000	(134.193.216.000)
2.2.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.642.800.000	4.715.962.000	62.456.050.000	78.864.064.000	-	135.836.016.000	(134.193.216.000)
2.2.02	Dinas Perhubungan	8.176.898.000	8.893.981.000	799.178.000	2.434.808.000	-	12.127.870.000	(2.956.981.000)
2.2.03	Dinas Perhubungan	8.176.898.000	8.893.981.000	799.178.000	2.434.808.000	-	12.127.870.000	(2.956.981.000)
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	5.236.199.000	4.188.201.800	10.291.618.000	4.608.187.000	-	19.148.016.000	(13.912.817.000)
2.1.06	Bepotanda	99.900.000	1.418.168.000	240.476.000	201.197.000	-	1.859.832.000	(1.759.932.000)
2.2.04	Dinas Kearsifan	5.136.299.000	2.749.042.000	10.050.142.000	4.199.000.000	-	17.284.104.000	(12.132.835.000)
	<b>KEPENDUDUKAN</b>	3.300.000.000	4.505.229.000	309.949.000	2.021.480.000	-	6.836.638.000	(3.536.638.000)
2.3.12	Dinas Pendaftaran Penduduk & Sipil	3.300.000.000	4.505.229.000	309.949.000	2.021.480.000	-	6.836.638.000	(3.536.638.000)
2.4.04	Dinas Padawasa & Kependudukan	1.774.706.000	3.491.418.000	625.857.000	947.500.000	100.000.000	5.864.782.000	(3.289.094.000)
2.5	Belanja Tak Tersingkir	-	-	625.857.000	947.500.000	100.000.000	5.864.782.000	(5.862.191.000)
2.6	Biaya Hibung	-	-	-	-	-	9.999.218.000	(9.999.218.000)
	<b>J U M L A H</b>	621.269.696.000	446.041.103.300	136.988.992.900	98.328.537.000	129.227.176.000	606.566.818.000	(176.794.322.000)

WALIKOTA SEMARANG

##

H. SUKAWI SITARIP



NOMOR : 10 Tahun 2004  
TANGGAL : 19 Juli 2004

NERACA KONSOLIDASI  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
PER 30 JUNI 2004

AKTIVA		PASIVA	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Utang</b>	
Kas	55.828.979.010	Utang Lancar	461.405.442
Bank	63.483.829.231	Utang Jangka Panjang	100.291.933.783
Deposito	26.400.030.000	Jumlah Utang	100.753.339.227
Uang Muka	496.376.634		
Preobtan	4.661.769.730		
Piutang	971.832.467		
Jumlah Aktiva Lancar	151.842.808.092		
Investasi	39.141.392.156		
Aktiva Tetap		Surplus	30.638.395.197
Tanah	1.262.173.749.639	Ekuitas	2.557.367.658.699
Bangunan	408.944.723.162		
Jr, Jembatan & Infrastruktur	30.747.562.245		
Kendaraan	655.797.928.748		
Peralatan Kantor	42.535.420.253		
Invent & Barang Lainnya	17.074.380.738		
Jumlah Aktiva Tetap	2.496.775.764.783		
Total Aktiva	2.677.759.963.031	Total Pasiva	2.677.759.963.031

WALIKOTA SEMARANG

sd.

B. SUKAWI SUTARIP

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH

Tanggal 30 Juni 2004

No.	URAIAN	TANGGAL/NO SK. GUB/ BUP/WALIKOTA dan SK PERSETUJUAN DPRD	SALDO AWAL Jan - 04 Rp.	PENAMBAHAN 1/1-30/6 2004 (Rp.)	PENGURANGAN 1/1-30/6 2004 (Rp.)	SALDO AKHIR 30 Jun 04 (Rp.)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinjaman SSUDP/P3KT IBRD/LOAN = 3749	- 21 September 1994 SLA-768/DP3/1994	40.084.848.596	0	3.925.000.000	36.159.848.596	Bank Dunia
2.	Pinjaman Urban Transport IBRD - RDI - 2817	- 19 Juni 1987 SLA-319/DDI/1987	20.077.524.331	0	0	20.077.524.331	Bank Dunia
3.	Pinjaman Urban V Pandaratan, IBRD-RDI-2408	- 17 Nopember 1984 SLA-161/DDI/1984	25.046.337.754	0	1.360.000.000	23.686.337.754	Bank Dunia
4.	Pinjaman KIP Urban III IBRD Bank Dunia	- 3 Juli 1979 SLA-12/006/IBRD/1979	2103.434.543	0	2.103.434.543	0	Bank Dunia
5.	Pembelian Gedung Dinas	- SK WKKD 22 Juli 2003 No. 900 / 4138 - SK Persetujuan DPRD No. 10 Th. 2003, 31-7-2003	24.880.458.699	0	5.706.200.274	19.174.258.425	BPD
	<b>Jumlah</b>		<b>112.192.603.923</b>	<b>0</b>	<b>13.094.634.817</b>	<b>99.097.969.106</b>	

WALIKOTA SEMARANG

td

H. SUKAWI SUTARIP

PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DAFTAR HUTANG DAERAH

Tanggal 30 Juni 2004

No.	Jenis Piutang	Saldo awal 1 Januari 2004 Rp.	Penambahan 1/01/2004 - 30/6/2004 Rp.	Pengurangan 1/01/2004 - 30/6/2004 Rp.	Saldo Akhir 30 Juni 2004 Rp.	Perjajian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Piutang Pajak	1.181.324.738	-	317.860.283	863.464.455	-
2.	Piutang Pelayanan RSI/	94.137.023	-	47.625.117	46.511.906	-
3.	Piutang Dinas Pura	100.200.447	-	289.749.192	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.235.491.813</b>	<b>-</b>	<b>345.285.400</b>	<b>870.796.413</b>	

WALIKOTA SEMARANG

sa

IL SUKAWI SUTARIP